

DAMPAK DEFISIT ANGGARAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Hendrin H. Sawitri (hendrin@mail.ut.ac.id)
Universitas Terbuka

ABSTRACT

The purpose of the research is to analyze the effect of budget deficit on economic growth. This analysis implements general evaluation estimator which is used in Didiek Susetyo researched (2001). Data economic variables used annually 1995 – 2005. Findings shows that budget deficit have negative effect on economic growth, while the lag of ratio export income (PDB) have positive effect, that indicate export probably to increase. The attention to uphold the economic growth that some condition, accountability and transparency of government budget, fairly state-local government fiscal balance, support to increasing export and through out of crisis the Indonesia people.

Key words: budget deficit, economic growth, fiscal policy, subsidy

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama bagi negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi tidak hanya tertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, keamanan, serta kualitas sumberdaya termasuk sumberdaya manusia dan lingkungan hidup. Khususnya pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan yang kondusif agar tercapai peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahun sesuai dengan yang sudah ditargetkan.

Pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan setiap tahunnya mencerminkan kinerja perekonomian pada tahun tersebut sedangkan kinerja ekonomi itu sendiri sangat tergantung pada kondisi internal maupun eksternal dari negara yang bersangkutan. Sementara itu, kondisi eksternal sangat terkait dengan keadaan perekonomian dunia yang semakin mengglobal. Sebagai contoh bahwa kondisi eksternal Indonesia terkait dengan permasalahan krisis dunia pada saat ini perhatikan dua kondisi berikut ini yaitu pertama, meningkatnya harga minyak mentah dunia yang mencapai 60 US\$ per barel per Januari 2006. Ke dua, adanya krisis moneter dimana nilai kurs dollar terhadap rupiah semakin meningkat sampai Rp 9.460,00 per Januari 2006.

Naiknya harga minyak mendorong Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia meninjau kembali perkiraan pertumbuhan ekonomi Asia. Laporan ADB pada bulan April 2005 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia Timur pada tahun rata-rata 6,7% hingga 7,2%. Nampaknya angka tersebut harus direvisi. Pemerintah dalam asumsi makro APBN 2005 penyesuaian, proyek pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,5%, inflasi 7,0%, suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) 8,0%, nilai tukar rupiah Rp 8.900,00 per dollar Amerika Serikat dan harga minyak sebesar 35 dollar AS per barrel serta produksi minyak sebesar 1,125 juta barrel per hari. Atas dasar asumsi tersebut, dalam patokan dasar anggaran, subsidi bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan akan naik dari Rp 19 triliun menjadi Rp 60,1 triliun sehingga ada kenaikan pembayaran subsidi sebesar Rp 41,1 triliun. Hal ini mengakibatkan terjadi pembengkakan defisit anggaran sekitar 1,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengakibatkan kekurangan pembiayaan cukup

signifikan dan sangat membebani keuangan negara. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang melonjak pada akhir-akhir ini akan memperparah krisis ekonomi, yaitu menyebabkan subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah melonjak drastis. Asumsi makro tersebut sudah tidak relevan lagi karena nilai tukar dan harga minyak dunia sudah sangat jauh berbeda. Untuk itu pemerintah sebaiknya merevisi asumsi tersebut.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) masih menunjukkan defisit yang kian membesar, hal ini akibat dari semakin besarnya subsidi yang harus dikeluarkan terutama BBM. Sementara itu dari sisi penerimaan dari pajak belum menunjukkan hasil yang maksimal meskipun upaya penarikan pajak dengan memperluas basis pajak telah dilaksanakan. Di sisi lain kebijakan fiskal yang merupakan salah satu piranti kebijakan pemerintah cenderung mengalami distorsi dalam implementasinya. Misalnya, fenomena munculnya pengelolaan dana negara APBN terutama pada *Government Expenditure* menjadi sasaran empuk pengelolaan yang tidak sesuai aturan.

Berbagai upaya reformasi kebijakan fiskal sering dilakukan agar perekonomian berjalan pada jalur yang benar. Namun hal ini belum berhasil karena pengaruh kebijakan non ekonomi yang lebih dominan misalnya saja adanya masalah sosial dan kesehatan serta terjadinya bencana alam yang tidak dapat diperkirakan. Bermula dari krisis ekonomi tahun 1997 hingga sekarang berlanjut dengan krisis-krisis lain mengakibatkan perekonomian Indonesia masih sangat sulit untuk tumbuh positif. Krisis ekonomi ditandai dengan menurunnya permintaan agregat sehingga kondisi perekonomian menunjukkan adanya ciri-ciri depresi seperti menurunnya daya beli secara drastis, berkurangnya bahkan hilangnya minat investasi asing, dan meningkatnya pengangguran di berbagai sektor. Kondisi tersebut diperparah oleh sisi penawaran yang semakin turun. Bukan saja produksi yang menurun tetapi juga terjadi ketidakkondusifan berbagai kebijakan yang mengakibatkan daya respon (elastisitas) penawaran sangat lemah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dan defisit anggaran dapat dilihat pada Tabel 1.

Kebijakan fiskal dalam perekonomian dituangkan dalam bentuk pos-pos yang tercantum pada dua sisi yaitu penerimaan dan belanja pemerintah. Fungsi fiskal meliputi tiga aspek penting yang mencerminkan peran pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Romer (1996), secara simultan fungsi fiskal bertujuan untuk menciptakan kondisi makro ekonomi secara kondusif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan tenaga kerja yang sekaligus menekan jumlah pengangguran, pengendalian tingkat inflasi, dan mendorong distribusi pendapatan yang semakin merata.

Gambaran APBN di Indonesia tercermin pada pos dalam anggarannya. Sisi penerimaan negara mencakup semua penerimaan dari pajak dan bukan pajak, sedangkan sisi pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Ada beberapa alternatif untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan mengupayakan penerimaan dalam negeri dapat ditingkatkan, mengupayakan berkurangnya ketergantungan utang luar negeri, dan menekan pengeluaran negara dengan menerapkan skala prioritas tinggi serta yang sedang marak pada pemerintahan yang sekarang sedang berjalan adalah dengan pemberantasan korupsi.

Defisit anggaran menjadi penting dalam masa krisis sehingga banyak persoalan menjadi dilematis dalam memilih kebijakan fiskal yang tepat. Defisit ataupun surplus anggaran ini menjadi isu penting untuk dikaji karena dalam siklus bisnis defisit anggaran menjadi pembahasan yang cukup serius dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dari permasalahan tersebut maka artikel ini akan mengkaji kebijakan fiskal khususnya untuk mengetahui dampak kebijakan defisit anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Defisit Anggaran (atas harga berlaku)

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004
Pertumbuhan (%)	16,5	16,2	8,0	10,9	12,9
Defisit (miliar rupiah)	-45400	-17340	-27670	-33660	-26271

Ditinjau dari sisi ekonomi makro, elemen kebijakan fiskal dalam hal ini pajak mempunyai hubungan dengan pendapatan nasional. Hubungan ini bisa didekati dengan keseimbangan umum (Soelistyo, 2003):

$$Y = C + I + G + (X - M) \dots \dots \dots (1)$$

Dimana Y=pendapatan domestik bruto, C=konsumsi masyarakat, G=pengeluaran pemerintah, X=ekspor dan M=impor. Pada pengeluaran pemerintah, sumber pembiayaannya berasal dari pajak (Tx) sehingga dapat dikatakan pajak merupakan sumber dari pendapatan nasional. Pemerintah juga melakukan pengeluaran berupa pengeluaran transfer (Tr) pada sektor tertentu. Pengeluaran transfer adalah pengeluaran dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran transfer ini berbentuk subsidi dan hibah terutama pada golongan rakyat miskin. Seperti juga pajak, pengeluaran transfer merupakan pengeluaran tanpa balas jasa langsung sehingga pengeluaran transfer juga disebut sebagai pajak negatif.

Di lain pihak, tambahan pajak (T) menyebabkan mengecilnya arus perputaran pendapatan nasional, jadi T adalah kebocoran, sementara itu I (Investasi) merupakan injeksi. Secara teoritis defisit anggaran terjadi karena kemampuan penerimaan negara (T) tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran negara (G) atau terjadi ketidak seimbangan (T<G). Keseimbangan umum terjadi bila:

$$I + G = S + T \dots \dots \dots (2)$$

Selanjutnya untuk mengetahui dampak perubahan penerimaan pajak terhadap keseimbangan pendapatan nasional digunakan angka pengganda pajak (*multiplier of tax*) yaitu rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan penerimaan pajak. Secara sistematis angka pengganda pajak adalah:

$$dY/dTx = k_t = \frac{-b}{1-b} \dots \dots \dots (3)$$

dimana k_t = angka pengganda pajak, dY = perubahan pendapatan nasional, dTx = perubahan pajak yang diperoleh dan b = hasrat untuk mengkonsumsi (*marginal propensity to consume/MPC*). Jika pajak (Tx) bersifat proporsional terhadap pendapatan maka $Tx = tY$ sebagai *built in stabilizer* artinya sebagai alat otomatis dalam mengurangi gejolak perubahan pendapatan nasional.

Bentuk kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dapat dilakukan dengan melakukan perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan perubahan dalam penerimaan

pemerintah seperti pajak. Gambaran mengenai efek kebijakan fiskal terhadap perekonomian dapat dilihat pada tiga bentuk analisis sebagai berikut (1) menaikkan pengeluaran pemerintah (G) untuk membangun infrastruktur, (2) menambah subsidi dan pembayaran transfer, dan (3) mengurangi pajak pendapatan (T). Perubahan ini bisa mempengaruhi Pendapatan Nasional, misal efek transfer dan penurunan pajak akan menambah konsumsi (ΔPC) sehingga pendapatan nasional meningkat masing-masing sebesar multipliernya kali besarnya $b \cdot \Delta Tr$ (MPC kali periode Tr) dan $b \cdot \Delta T$ (MPC kali perubahan pajak). Hal ini sangat berpotensi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan nasional karena bersifat ekspansif.

Kebijakan fiskal dengan menambah pengeluaran pemerintah akan berimplikasi pada kegiatan ekonomi dan harga, baik dibiayai dengan meminjam dari masyarakat maupun dari bank sentral. Demikian juga bahwa kebijakan fiskal dengan menurunkan pajak dapat juga dilakukan dengan mengurangi sejumlah tertentu pajak yang dibayar oleh perseorangan dan menurunkan persentase pajak yang harus dibayar. Namun kebijakan fiskal dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak dapat mengurangi laju defisit anggaran besar tetapi kegiatan ekonomi akan bersifat kontraktif (Meier 1995).

Model teoritis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh defisit anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi adalah model yang dikembangkan oleh Goldstein dan Monte (dalam Weiss 1995). Model ini menggunakan model *generalized evaluation estimator*. Secara matematis hubungan formal dari model ditulis sebagai berikut:

$$\Delta T = a + b_1(T)_{-1} + b_2(P)_{-1} + b_3(E)_{-1} + b_4(A) + b_5(d)$$

dimana ΔT = perubahan dari variabel target
 T_{-1} = nilai *lag* dari salah satu variabel independen
 P_{-1} = nilai *lag* dari variabel kebijakan yang digunakan untuk mencapai target
 E_{-1} = nilai *lag* dari variabel eksternal
 A = trend waktu
 d = variabel *dummy* kebijakan, apabila nilai 1 mencerminkan adanya program reformasi dan nol apabila tidak ada
 a, b adalah parameter

Pada penelitiannya Susetyo (2001) menggunakan model untuk mendapatkan penilaian bahwa kondisi perekonomian reformasi dan bukan reformasi memiliki perbedaan, baik pada kondisi permulaan program maupun kondisi yang akan mempengaruhi aksi kebijakan apa yang akan dilakukan jika tidak ada lagi program reformasi secara formal. Lebih jauh Susetyo menyebutkan bahwa secara statistik apa yang diharapkan adalah mengestimasi hubungan antara instrumen kebijakan dan target kebijakan. Pada awalnya dikehendaki untuk mengetahui efek dari kebijakan dan selanjutnya untuk menentukan alternatif kebijakan apa yang akan dilakukan.

Dari model tersebut kemudian diturunkan sebuah aplikasi model sebagai berikut.

$$rPDB = a + b_1PDB_{-1} + b_2X/PDB_{-1} + b_3Dfns/PDB_{-1} + b_4TrendWkt + b_5dum$$

di mana $rPDB$ = tingkat pertumbuhan ekonomi
 PDB_{-1} = lag pendapatan nasional
 X/PDB_{-1} = lag rasio ekspor terhadap PDB

Defs/PDB-1 = lag rasio defisit anggaran terhadap PDB
 Trend Wkt = trend waktu
 dum = dummy variable
 a,b1,b2,b3,b4 dan b5 = parameter

Dari model tersebut efek dari program reformasi ditunjukkan oleh tanda dan signifikansi koefisien b_5 yaitu pada variabel *dummy*. Untuk selanjutnya penelitian ini menggunakan model dari Susetyo tersebut dengan sedikit modifikasi. Model yang digunakan adalah:

$$rPDB = a + b_1Def_{-1} + b_2X/PDB_{-1} + b_3M/PDB_{-1} + e$$

dimana $rPDB$ = tingkat pertumbuhan ekonomi
 Def_{-1} = lag defisit anggaran per tahun
 X/PDB_{-1} = lag rasio ekspor terhadap PDB
 M/PDB_{-1} = lag rasio impor terhadap PDB
 a,b1,b2, b3 , b4 , b5 = parameter

Periode pengamatan yang dilakukan mulai tahun 1986 sampai dengan 2005.

Komposisi APBN Indonesia terdiri dari sisi penerimaan negara dan sisi pengeluaran belanja negara. Sisi penerimaan negara mencerminkan kemampuan negara dalam menggali sumber-sumber penerimaannya yang potensial untuk memperbesar tabungan pemerintah. Hal ini tercermin pada semua penerimaan dari pajak dan bukan pajak. Pada sisi pengeluaran mencerminkan kebutuhan belanja negara yang harus dibiayai dari penerimaan negara, hal ini tercermin pada semua pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Sistem akuntansi penyusunan APBN telah mengalami perubahan format yaitu dari bentuk tabel T (*T-account*) menjadi bentuk tabel vertical (*V-account*). Bentuk tabel T menggunakan prinsip anggaran berimbang dan dinamis sedangkan tabel V menggunakan prinsip anggaran surplus/defisit secara transparan. Surplus atau defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan negara plus hibah dengan belanja negara. Surplus bila hasilnya positif dan defisit bila hasilnya negatif.

Apabila kita membahas tentang kebijakan fiskal di Indonesia maka kita harus memahami struktur penerimaan dan pengeluaran APBN. Dari Tabel 2 terlihat bahwa pada tahun 2004 terdapat defisit anggaran sebesar 26.271,5 miliar rupiah sementara cicilan utang yang harus dibayar sebesar 45.524,5 miliar rupiah. Dana yang digunakan pemerintah untuk membayar cicilan ini berasal dari dalam negeri sebesar 50.050,5 miliar rupiah ditambah dengan utang pemerintah baru sebesar 21.745,6 miliar rupiah sehingga pembiayaan defisit bersih adalah 26.271,5 miliar rupiah.

Defisit anggaran pada tahun 2004 dan 2005 berselisih sedikit yaitu sebesar 1,3 dan 0,9. Defisit ini lebih kecil dari tahun 2000 yang sebesar 4,9 persen. Penurunan defisit ini karena sudah mulai diberlakukannya program pelaksanaan pengurangan subsidi BBM yang cukup kontroversial dikalangan masyarakat. Namun dengan program tersebut paling tidak defisit negara bisa dikurangi. Selain itu pengenaan PPN di pulau Batam sedang dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengurangi defisit anggaran yang akan datang.

Pemerintah cenderung menetapkan rencana APBN dan RAPBN yang bersifat defisit, hal ini mempunyai alasan yang diyakini bahwa penetapan tersebut mengacu pada beberapa asumsi dasar makro. Sebagai ilustrasi asumsi dasar makro dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. APBN Tahun 2004 dan 2005 (miliar rupiah)

URAIAN	2000	2004 ¹	2005 ²
Penerimaan Negara	137.700,0	403.031,9	438.024,9
- Perpajakan		279.207,5	319.440,5
- Bukan Pajak		123.824,4	118.584,4
- Hibah		737,7	5.761,8
Pengeluaran Negara	183.100,0	(430.041,2)	(463.331,9)
- Belanja Pemerintah Pusat		300.036,2	322.438,0
- Belanja Pemerintah Daerah		130.005,0	140.893,9
Keseimbangan primer			
Surplus/Defisit		36.956,2	40.199,9
Pembiayaan	-45.400,0	(26.271,5)	(19.545,2)
- Pembiayaan Dalam Negeri	45.400,0	26.271,5	19.545,2
- Pinjaman Luar Negeri		50.050,5	25.125,6
- Cicilan Utang Luar Negeri			
PDB		21.745,6	29.138,6
		(45.524,5)	(34.718,9)
	910.400,0	1.997.700,0	2.599.800,0
Rasio Defisit terhadap PDB (%)	4,9	1,3	0,9

Sumber: Laporan Bank Indonesia tahun 2004, 2005, diolah

Keterangan: ¹) dan ²) APBN-P

Tabel 3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2004 dan 2005

Indikator Makro	2004		2005	
	APBN	APBN-P	APBN	APBN-P
Produk Domestik Bruto (triliun Rp)	1.999,7	1.990,3	2.560,9 ¹⁾	2.599,8
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%)	4,8	4,8	5,4	5,5
Inflasi (%) ²⁾	6,5	7,0	5,5	7,0
Nilai Tukar Rupiah per US\$ ²⁾ (Rp)	8.600,0	8.900,0	8.600,0	8.900,0
Suku Bunga SBI 3 bulan (%) ²⁾	8,5	7,6	6,5	8,0
Harga Minyak Internasional (US\$/barell) ²⁾	22,0	36,0	24,0	35,0
Produksi Minyak Indonesia(juta barell.hari)	1.150	1.072	1.125	1.125

Sumber: Laporan Bank Indonesia tahun 2005

Keterangan: ¹⁾ PDB harga berlaku dengan menggunakan tahun dasar 2000

²⁾ Rata-rata

Bagaimana asumsi dasar tersebut tidak terpenuhi? Ada dua alternatif penyelesaiannya: 1) melakukan perubahan dalam RAPBN dengan menyesuaikan asumsi dasarnya, dan 2) harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai target paling tidak mendekati sasaran dengan besaran-besaran asumsi dasarnya. Ketidaktepatan asumsi dasar menunjukkan sasaran yang tidak realistis karena sasaran tersebut tidak seluruhnya ditentukan oleh variabel ekonomi tetapi variabel non-ekonomi justru lebih dominan (Susetyo, 2001).

Konsep Keynes untuk mengatasi keadaan krisis ekonomi dengan mendorong permintaan melalui defisit fiskal, tidak akan memecahkan persolalan (Boediono 2000). Hal ini karena respon sisi penawaran relatif lemah maka kenaikan permintaan justru akan memicu kenaikan harga daripada kenaikan output. Apabila ingin melakukan stimulasi sisi permintaan harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan daya respon penawaran (Susetyo, 2001). Hal ini terjadi akibat kelebihan

kapasitas di berbagai sektor yang tidak menjamin adanya respon penawaran karena adanya sistem birokrasi kelembagaan yang panjang dan tidak efisien. Sebagai langkah konkritnya harus ada pembenahan kerusakan kelembagaan tersebut.

Program stimulasi permintaan bukanlah hal yang mudah karena: 1) stimulasi kebijakan fiskal mempunyai ruang gerak yang terbatas karena beban hutang pemerintah sangat besar, 2) investasi swasta terutama swasta asing masih belum pulih dan 3) ekspor yang seharusnya kompetitif karena depresiasi rupiah ternyata tidak meningkatkan ekspor secara kualitatif maupun nominal serta 4) naiknya harga minyak dunia yang menembus 62 US\$/barrel memperparah kondisi perekonomian .

Pada kondisi krisis semacam ini yang dapat mendorong perubahan permintaan agregat adalah tingkat konsumsi. Namun pengeluaran konsumsi tidak dapat diandalkan untuk menjadi penentu kenaikan pendapatan nasional sebab konsumsi tidak bersifat otonom artinya hanya dapat meningkat apabila telah tercipta daya beli baru di tangan konsumen. Pada hal daya beli masyarakat cenderung menurun karena adanya inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM.

Kunci untuk menstimulir sisi permintaan terletak pada bangkitnya investasi swasta dan ekspor. Langkah ini dapat ditempuh dengan tiga cara: 1) upaya tersebut sangat tergantung pada kinerja untuk mengembalikan kepercayaan investor dan menghilangkan berbagai hambatan di sisi penawaran, 2) upaya pembenahan agar fungsi institusi pendukung dalam proses produksi dan distribusi berjalan kembali, 3) upaya keluar dari krisis harus berupa tindakan yang kondusif dan simultan untuk menstimulasi permintaan agregat.

Menyimak asumsi dasar makro tahun 2005 dimana tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% dengan inflasi sebesar 7% dan suku bunga SBI 8% serta menyimak komposisi RAPBN 2005 dengan rencana defisit 0,9% dari PDB maka banyak hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu injeksi investasi yang cukup besar meskipun pada keadaan itu ada indikasi ekspansif kecil namun angka pengganda masih relatif kecil sehingga gerak stimulus fiskal untuk pertumbuhan sangat rendah. Dengan demikian diperlukan usaha lain yaitu dengan mendongkrak tabungan yang merupakan sumber untuk investasi. Investasi ini seyogyanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, artinya tidak ada penyimpangan secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan sisi penawaran.

Penggunaan Metode *Lag* pada Variabel Independen.

Dalam ilmu ekonomi ketergantungan suatu variabel Y (variabel dependen) atas variabel X (independen) jarang bersifat seketika, terutama yang menyangkut suatu kebijakan. Seringkali Y bereaksi terhadap X dengan suatu selang waktu. Selang waktu seperti itu disebut *lag*. *Lag* pada variabel rasio Ekspor terhadap PDB mempunyai pengaruh waktu, dimana suatu kebijaksanaan ekspor akan mempunyai selang waktu untuk berpengaruh terhadap pertumbuhan.

Hasil Penelitian

Dengan model tersebut, berdasarkan data periode waktu pengamatan dari tahun 1986 sampai dengan 2005 (perkiraan IFS) , maka dengan persamaan regresi dan dengan mempergunakan program Eviews-5 diperoleh hasil sebagai berikut.

$$rPDB = 9,12 - 0,000788 \text{ Def}_{-1} + 78,65(X/PDB)_{-1} - 1,40(M/PDB)_{-1}$$

$$(2,18) \quad (-3,67)^* \quad (1,77)^{**} \quad (-0,107)$$

R-square : 0,459

DW stat : 2,152

F stat : 4,534

*Signifikan pada 95%

** Signifikan pada 90%

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *lag* defisit berpengaruh secara negatif terhadap variabel dependen dan signifikan pada 95%, variabel *lag* rasio impor terhadap PDB berpengaruh negatif terhadap variabel dependen, variabel rasio ekspor terhadap PDB dan variabel *lag* PDB mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen dan signifikan pada 90%.

Hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya gejala perekonomian akan berdampak pada sisi penerimaan yang mengakibatkan pula kenaikan defisit anggaran dan gejala perekonomian juga akan berdampak negatif pada sisi impor. Hal ini akan berpengaruh secara negatif pula pada pertumbuhan ekonomi. Keadaan sekarang yang merupakan dampak adanya krisis harga BBM dan nilai tukar dollar terhadap rupiah akan memperparah defisit anggaran karena subsidi yang akan dikeluarkan akan sangat membebani sisi pengeluaran negara. Hal ini akan sangat mengkhawatirkan apabila terjadi inflasi yang tinggi akibat dari tingginya bahan baku impor. Demikian pula kebijakan fiskal yang dikeluarkan belum dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sisi ekspor berhasil memacu kenaikan pertumbuhan ekonomi secara positif, ekspor masih menyimpan harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Arah peningkatan ini diharapkan dapat didorong dari ekspor barang yang mempunyai kandungan lokal yang tinggi sehingga tidak terpengaruh oleh tingginya harga bahan baku impor. Harapan selanjutnya adalah ekspor mempunyai daya saing yang tinggi di pasar internasional.

Nilai R^2 adalah 0,459 yang berarti 46 persen variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 54% dijelaskan oleh variabel di luar pengamatan. Nilai F tabel $(3,06) \leq$ nilai F hitung $(4,53)$ yang berarti secara serempak variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen atau variabel independen mempunyai hubungan yang relevan dengan variabel dependen. Nilai $D-W$ hitung $(2,15) <$ $D-W$ tabel $(du=1,74, dl=0,60, 0,01)$, sehingga terletak pada daerah penerimaan yang artinya tidak ada otokorelasi positif maupun negatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan fiskal dari sisi permintaan melalui defisit anggaran belanja dalam situasi krisis pada akhir-akhir ini tidak banyak mengatasi masalah karena bertambahnya permintaan yang tidak mendapat respon dari penawaran. Hal ini tidak akan memperbaiki perekonomian. Namun demikian, stimulus fiskal dapat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan hanya pada unsur permintaan yang berpeluang tinggi sajalah yang mungkin harus didorong pengembangannya.

Dari hasil kajian ditemukan bahwa sisi ekspor sangat berpeluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini merupakan momen yang tepat untuk mengembangkan pasar ekspor terutama ke negara yang mempunyai tingkat permintaan yang tinggi seperti China, Timur Tengah dan Eropa Timur. Namun dorongan ke arah ekspor diimbangi dengan kehati-hatian dimana yang perlu diprioritaskan adalah komoditi yang mempunyai kandungan lokal yang tinggi, sehingga tidak terpengaruh oleh tingginya harga bahan baku impor. Namun demikian ekspor komoditas primer belum mendatangkan devisa yang tinggi, peningkatan ekspor yang dinamis terdapat pada komoditas non-migas maka kinerja dari ekspor ini tergantung dari arus masuk investasi terutama PMA yang mempunyai teknologi *know-how* yang mampu meningkatkan daya saing. Kebijakan defisit anggaran

ternyata belum mendapat respon dari sisi penawaran. Stimulus ini hendaknya dibarengi dengan sisi moneter terutama dalam penentuan suku bunga pinjaman dan SBI baik untuk UKM maupun pengusaha besar.

Dengan naiknya harga minyak dunia yang mencapai level 60 \$ US per barel pada tahun 2005 sangat memukul impor minyak mentah yang merupakan bahan baku ekspor minyak kita dan untuk mencukupi konsumsi dalam negeri. BBM merupakan barang primer dan utama dalam menciptakan produksi nasional, karena mempunyai daya derivasi yang tinggi terhadap produk lain. Signifikansi harga BBM dunia mengakibatkan harga impor cenderung meningkat. Hal ini sangat membebani subsidi yang pada akhirnya defisit anggaran negara semakin besar. Pemerintah telah berupaya menghimbau untuk pemakaian BBM yang lebih irit. Dalam jangka pendek upaya tersebut seharusnya dapat mengerem konsumsi BBM, namun dalam jangka panjang konsumsi yang semakin meningkat tersebut harus dibarengi dengan optimalisasi produksi BBM dalam negeri dan harus dibarengi pula dengan regulasi kebijakan dalam tata pengelolaan produksi dan distribusi BBM serta eksplorasi baru sumber BBM dan penggalakan penggunaan bahan bakar lain selain BBM.

Defisit anggaran yang diperkirakan 0,8% (APBN-P) dari PDB dalam APBN 2005 terlihat bersifat ekspansif dibanding dengan tahun 2004 sebesar 1,3% dari APBN 2004. Namun sifat ekspansif ini tidak diimbangi dengan efek multiplier pengeluaran yang diperkirakan relatif lebih kecil, sehingga tidak mempunyai daya stimulasi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diakibatkan sebagian dana digunakan untuk membayar cicilan dan bunga utang dan membayar subsidi BBM yang semakin besar serta membayar bunga obligasi publik maupun swasta.

Untuk selanjutnya langkah kebijakan fiskal harus dilengkapi dengan kebijakan lainnya terutama kebijakan untuk mendorong sisi penawaran serta pembenahan institusi yang menghambat kinerja sisi penawaran. Beberapa kebijakan sebagai alternatif perbaikan perekonomian antara lain: 1) penghematan di segala lini, terutama penghematan sumberdaya alam, termasuk konservasi hutan, pemberantasan *illegal logging*, penggunaan BBM, pemberantasan korupsi, praktek-praktek *mark-up*, dan lain sebagainya, 2) penegakan pada keamanan dan ketertiban serta hukum yang berlaku untuk mengembalikan kepercayaan investor, 3) pembenahan birokrasi serta koordinasi antara para menteri, DPR dan penegak hukum dalam mengambil keputusan dan kebijakan agar tidak merugikan rakyat, 4) pencabutan subsidi BBM merupakan langkah yang paling rasional untuk mengurangi tekanan defisit anggaran yang terus membesar, 5) memperbaiki ekspektasi *return* di *outlet* investasi domestik dengan mempermudah pelaksanaan agenda penerbitan SUN, 6) perlu dikembangkan semacam lembaga kliring (*clearing haouse*) untuk menangani permintaan dan pasokan dollar dari seluruh BUMN, tidak terbatas pada Pertamina. Kelebihan permintaan atau pasokan lembaga kliring dollar AS dari BUMN ini akan dilempar ke pasar. Kurs yang digunakan oleh lembaga kliring tersebut sama dengan kurs umum untuk menghindari adanya diskriminasi harga.

REFERENSI

- Boediono. (2000). Perspektif makro pemulihan ekonomi Indonesia. *Makalah dalam Konggres ISEI XIV*, 21 April 2000.
- Bank Indonesia. (2004). *Laporan Perekonomian Indonesia 2004*.
- Bank Indonesia. (2005). *Laporan Perekonomian Indonesia 2005*.
- Meier, G.M. (1995). *Leading issues in economic development*. Sixth ed. New York: Oxford University Press.
- Romer, D. (1996). *Advance macroeconomics*. Singapore: McGraw-Hill International Editions. Economics Series.

- Prawirosetoto Yuwono F.X. Desentralisasi fiskal di Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 2/2, Agustus, FE Univ. Kat. Ind. Atmajaya, Jakarta.
- Soelistyo. (2003). *Pengantar ekonomi makro*. Jakarta: Pusat Penerbitan, Universitas Terbuka.
- Susetyo, D. (2001). Reformasi kebijakan fiskal: Pengaruh defisit anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol 3/1 Februari. Palembang BPFE: Universitas Sriwijaya.
- Weiss, J. (1995). *Macro stabilization: Government budget deficit in Economic policy in Developing Countries*, The Reform Agenda, Chap 2. Prentice-Hall London.